

Analisis Program Bantuan Sosial Pemerintah Dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi Di Desa Tetehosi Afia Mazingo

Rini Indasari Zega¹, Yearning Harefa², Asali Lase³, Bezisokhi Laoli⁴

^{1,2,3,4} Universitas Nias, Indonesia

E-mail: riniindasarizega04@gmail.com¹, yearninghrf@gmail.com², asallase2016@gmail.com³, bezisokhilaoli@gmail.com⁴

Article History:

Received: 08 Agustus 2025

Revised: 18 Oktober 2025

Accepted: 13 November 2025

Keywords: Program Bantuan Sosial, Pemerintah Desa, Ketimpangan Ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat

Abstract: Ketimpangan ekonomi masih menjadi permasalahan serius khususnya di Desa Tetehosi Afia Mazingo. Ketimpangan ini ditandai dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 1.000.000 per bulan masyarakat yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ini adalah melalui program bantuan sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi lapangan dan wawancara langsung dengan warga desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) Program Bantuan Harapan (PBH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Indonesia Pintar (PIP), Beras Sejahtera (Rastra), BPJS dan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni memang telah disalurkan, namun belum mampu mengatasi ketimpangan secara menyeluruh. Beberapa permasalahan yang ditemukan antara lain ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, pemanfaatan bantuan yang masih bersifat konsumtif, serta minimnya akses terhadap pendidikan dan lapangan kerja. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan, seperti integrasi bantuan sosial dengan program pemberdayaan ekonomi lokal agar bantuan tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara jangka panjang.

PENDAHULUAN

Kesenjangan ekonomi, juga dikenal sebagai ketimpangan ekonomi, adalah kondisi tidak seimbang yang terjadi di masyarakat yang didasarkan pada faktor ekonomi, (Ningrum dkk., 2024). Kesenjangan ekonomi regional dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional dan menimbulkan ketidakadilan sosial dan masalah keuangan, oleh karena itu negara memerlukan

kebijakan pembangunan nasional yang efektif untuk mengatasi ketimpangan perekonomian daerah (Sugiasuti & Pratama, 2022). Faktor penyebab ketimpangan ekonomi sangat beragam dan meliputi perbedaan pendapatan, akses terhadap pendidikan dan pelatihan, kesenjangan akses terhadap sumber daya, serta ketidakmerataan struktur ekonomi menurut (Aminda & Aminda, 2024) . Semakin besar proporsi pendapatan yang diterima masyarakat dengan kelompok pendapatan tertinggi terhadap pendapatan yang diterima masyarakat dengan kelompok pendapatan terendah berarti bahwa ketimpangan semakin besar (Khoironi & Sudrajat, 2023) . Ketimpangan ekonomi merupakan isu krusial yang terus menjadi tantangan utama di banyak negara berkembang. Ketimpangan ini tercermin dari distribusi pendapatan yang tidak merata, kesenjangan dalam akses pendidikan dan kesehatan, serta perbedaan signifikan dalam kesempatan ekonomi (Gunung dkk., 2023) . Kesenjangan ekonomi dapat menimbulkan dampak negatif jangka panjang terhadap stabilitas sosial dan politik. Sumber daya ekonomi yang tidak seimbang didistribusikan di masyarakat ini terjadi karena perbedaan besar dalam kemampuan finansial antara kelompok pendapatan tinggi dan rendah (Yuliantaka, 2025). Distribusi kekayaan dan kesempatan yang tidak merata dapat menimbulkan ketidakpuasan sosial, yang dapat menimbulkan konflik dan protes sosial. Kesenjangan ini juga mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, karena kelompok marginal cenderung mempunyai suara yang lebih lemah.

Ketimpangan pendapatan merupakan permasalahan yang sangat serius di Indonesia, dimana 10% penduduk terkaya mempunyai pendapatan 29 kali lebih besar dibandingkan 10% penduduk termiskin, kesenjangan ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk distribusi sumber daya yang tidak merata, terbatasnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas, dan kurangnya kebijakan perlindungan sosial yang komprehensif, (Yuliani dkk., 2025). Selain itu, ketimpangan pendapatan berdampak besar terhadap masyarakat pedesaan dan kelompok marginal, sehingga memperburuk tingkat kemiskinan secara keseluruhan di negara ini (Aziz dkk., 2025). Menurut (Hababil dkk., 2024) permasalahan ketimpangan pendapatan dapat diatasi dengan perubahan struktural dan kebijakan pemerintah. Perubahan struktural merupakan prasyarat untuk meningkatkan pertumbuhan berkelanjutan dan mengatasi permasalahan perekonomian, serta mendukung kelangsungan pembangunan itu sendiri. Sedangkan kebijakan pemerintah mengacu pada serangkaian keputusan yang diambil pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, dalam hal ini mengatasi masalah ketimpangan. Namun beberapa kebijakan pemerintah seringkali tidak diimbangi dengan prinsip keadilan dan kesetaraan sehingga memicu kesenjangan atau kesenjangan.

Dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan dan peningkatan akses masyarakat terhadap pangan, pemerintah telah meluncurkan program berbagai bantuan sosial untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, seperti program bantuan harapan (PKH), bantuan sosial tunai (BST), dan program pemerdayaan kesejahteraan keluarga (PPKK), (Hababil dkk., 2024) . Pemerintah menggunakan berbagai program atau stimulus, Salah satunya adalah Program Bantuan Sosial. Dengan program bantuan sosial ini dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu masyarakat menghadapi dampak krisis, memperbaiki perekonomian penduduk penerima bantuan, membantu melindungi kelompok yang lebih beresiko seperti lansia, penyandang disabilitas dan keluarga miskin, (Salsabil & Rianti, 2023) . Program bantuan sosial merupakan upaya pemerintah untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang berada dalam kondisi rentan atau miskin.

Menurut (Saniah & Afrizal, 2024) bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang

atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang sifatnya selektif. (Masrohatin dkk., 2025) mendefinisikan bantuan sosial sebagai program transfer dana atau barang yang dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dengan mendistribusikan kemakmuran dan melindungi rumah tangga dari perubahan kondisi pendapatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tujuan pemberian bantuan sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan risiko sosial. (Supit & Lumingkewas, 2023) menjabarkan tujuan bantuan sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan bencana.

Desa Tetehosi Afia Mazingo merupakan salah satu daerah yang mengalami ketimpangan ekonomi yang signifikan. berdasarkan observasi, presentase penduduk miskin di Desa Mazingo Tetehosi Afia rata-rata mayoritas pekerjaan adalah petani, yang dimana mayoritas pekerjaan ini mencapai 50% dengan penghasilan rata-rata 1 juta perbulan. Pendapatan Masyarakat didesa mazingo ini tergolong rendah untuk pendapatan perbulannya. berikut adalah tabel data yang nunjukan ketimpangan ekonomi didesa mazingo.

Tabel 1. Ketimpangan Ekonomi Berdasarkan Pekerjaan

Ketimpangan ekonomi		
Jenis profesi	Rata-rata penghasilan perorang /bulan	Rata-rata profesi
petani	Rp 1,000,000	50%
Perangkat desa	Rp 2.000.000	5%
wiraswasta	Rp 4.000.000	25%
PNS	Rp 4.000.000	10%
Karyawan swasta	Rp 1,500,000	5%
honoror	Rp 400.000	5%
JUMLAH		100%

Sumber: data desa tetehosi afia, mazingo tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa kondisi ekonomi masyarakat masih menunjukkan kesenjangan yang cukup signifikan antar profesi. Mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, yaitu sebesar 50% dengan rata-rata penghasilan per orang per bulan sebesar Rp 1.000.000. Jumlah ini relatif rendah jika dibandingkan dengan profesi wiraswasta dan PNS yang masing-masing berpenghasilan rata-rata Rp 4.000.000 per bulan, meskipun hanya mewakili 25% dan 10% dari total populasi. Perangkat desa memiliki penghasilan Rp 2.000.000 per bulan dan hanya mencakup 5% dari jumlah penduduk. Karyawan swasta yang juga hanya 5% memperoleh Rp 1.500.000 per bulan, sedangkan kelompok honoror berada pada posisi paling rendah dengan penghasilan hanya Rp 400.000 per bulan, meskipun jumlahnya juga 5%. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih berada pada tingkat penghasilan rendah, yang berdampak terhadap daya beli dan kualitas hidup mereka secara umum, sehingga diperlukan perhatian khusus dari pihak terkait untuk mendorong peningkatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di desa ini.

Berdasarkan data ketimpangan ekonomi tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada dua hal utama. Pertama, bagaimana pelaksanaan program bantuan sosial pemerintah di Desa Tetehosi Afia, Mazingo. Kedua, bagaimana dampak program bantuan sosial tersebut terhadap pengurangan ketimpangan ekonomi di kalangan masyarakat desa. Ketimpangan ini tercermin dari dominasi profesi petani yang mencapai 50% namun hanya memiliki penghasilan Rp 1.000.000 per bulan, jauh lebih rendah dibandingkan profesi wiraswasta dan PNS

yang berpenghasilan Rp 4.000.000 dengan jumlah penduduk yang jauh lebih sedikit. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara menyeluruh bagaimana pelaksanaan program bantuan sosial pemerintah di desa tersebut, serta untuk menganalisis sejauh mana bantuan sosial berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat, sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan, diantaranya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Nurwahyuliningsih & Arsyad, 2025) dengan judul “Analisis Dampak Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Gorontalo”. Latar belakang penelitian ini didorong oleh fakta tingginya angka ketimpangan ekonomi dan kemiskinan di provinsi Gorontalo, di mana program BPNTD dirancang untuk memberikan bantuan pangan kepada keluarga miskin secara non-tunai guna meningkatkan efisiensi dan transparansi distribusi bantuan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana BPNTD memengaruhi kesejahteraan penerima manfaat di tingkat rumah tangga maupun komunitas desa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dengan pengumpulan data melalui survei rumah tangga penerima bantuan, observasi lapangan dan studi dokumentasi program, kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan perbandingan kondisi pra-dan pasca penyaluran bantuan. Hasil penelitian menemukan bahwa penerima BPNTD menunjukkan peningkatan kesejahteraan relatif signifikan, termasuk meningkatnya konsumsi pangan serta efisiensi belanja rumah tangga, walaupun pengaruhnya terhadap penurunan ketimpangan ekonomi secara luas masih terbatas jika tidak disertai program sosial lainnya.

Penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh (Firdaus, 2022) berjudul “Transparansi Program Bantuan Langsung Tunai pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Waetuo, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara”. Latar belakang penelitian ini mengemuka ketika pemerintah menerapkan BLT massal selama pandemi untuk mengurangi dampak sosial-ekonomi masyarakat desa, dan perlu evaluasi terkait transparansi dan efektivitas distribusinya. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan bagaimana transparansi proses penyaluran BLT dari tahap pendataan, pencairan, hingga pelaporan serta dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap program. Metode penelitian digunakan sebagai studi kasus kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi kebijakan serta laporan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme penyaluran BLT sudah cukup sistematis, terdapat kelemahan dalam komunikasi dan pengawasan internal yang menyebabkan beberapa penerima menggugat ketepatan sasaran, namun secara umum BLT memberikan efek jangka pendek pada perbaikan ekonomi rumah tangga penerima.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Hermawati & Winarno, 2020) dengan judul “Persepsi Keluarga Penerima Manfaat tentang Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia”. Latar belakang penelitian ini adalah adanya keraguan masyarakat terhadap efektivitas berbagai program pemerintah seperti PKH, BPNT, dan BLT dalam menurunkan kemiskinan serta mengurangi ketimpangan antarkelompok penerima. Tujuan penelitian adalah mengeksplorasi persepsi dan pengalaman langsung keluarga penerima manfaat terhadap program-program tersebut dan sejauh mana mereka merasakan manfaatnya. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif dengan wawancara mendalam kepada sejumlah penerima manfaat, serta analisis dokumen kebijakan program sosial. Hasil penelitian mengungkap bahwa meskipun sebagian penerima mengakui adanya peningkatan dalam taraf hidup jangka pendek, banyak yang menyampaikan kekhawatiran mengenai keberlanjutan bantuan, administrasi yang kurang jelas, dan distribusi yang kadang tidak merata yang pada akhirnya mengurangi dampak program dalam

menurunkan ketimpangan jangka panjang.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu dalam hal fokus pada program bantuan sosial pemerintah dan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat. Sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif, baik kualitatif maupun kuantitatif, serta memanfaatkan data primer dan sekunder. Namun, penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena secara khusus menyoroti ketimpangan ekonomi antar kelompok profesi di tingkat desa, bukan hanya dampak terhadap kemiskinan secara umum. Selain itu, penelitian ini bersifat lebih mikro dengan konteks lokal yang spesifik, yaitu Desa Tetehosi Afia, Mazingo, sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih detail tentang dampak nyata bantuan sosial dalam menekan ketimpangan ekonomi pada tataran masyarakat desa.

LANDASAN TEORI

Pengertian Bantuan Sosial

Program bantuan sosial pemerintah, menurut (Saniah & Afrizal, 2024), merupakan upaya untuk membantu masyarakat miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, program ini meliputi berbagai jenis bantuan, seperti subsidi pangan, program keluarga harapan (PKH), dan bantuan langsung tunai (BLT). Pemerintah yang memiliki tujuan untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan agar pertumbuhan ekonomi dapat terus meningkat menetapkan 3 (tiga) jalur strategi pembangunan, yaitu Pro-Pertumbuhan (Pro-Growth) yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui investasi dengan meningkatkan kualitas pengeluaran pemerintah dan meningkatkan kualitas konsumsi, Pro-Lapangan Kerja (Pro-Job) yang bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan agar pengangguran dapat menurun sehingga pertumbuhan ekonomi semakin meningkat, serta Pro-Masyarakat Miskin (Pro-Poor) yang bertujuan untuk mengurangi jumlah kemiskinan di masyarakat dengan menyempurnakan sistem perlindungan sosial, meningkatkan pelayanan dasar, dan menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat, (Saragih, 2024).

Dengan program bantuan sosial ini dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu masyarakat menghadapi dampak krisis, memperbaiki perekonomian penduduk penerima bantuan, membantu melindungi kelompok yang lebih beresiko seperti lansia, penyandang disabilitas dan keluarga miskin. Program bantuan sosial merupakan upaya pemerintah untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang berada dalam kondisi rentan atau miskin. (Masrohatin dkk., 2025) menjabarkan tujuan bantuan sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan bencana.

Ketimpangan Ekonomi

Kesenjangan ekonomi, juga dikenal sebagai ketimpangan ekonomi, adalah kondisi tidak seimbang yang terjadi di masyarakat yang didasarkan pada faktor ekonomi, (Sugiastuti & Pratama, 2022). Kesenjangan ekonomi regional dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional dan menimbulkan ketidakadilan sosial dan masalah keuangan. Oleh karena itu, negara memerlukan kebijakan pembangunan nasional yang efektif mengatasi ketimpangan perekonomian daerah (Yuliantaka, 2025). Istilah ini digunakan untuk menggambarkan perbedaan yang signifikan atau ketidakseimbangan yang terjadi antara kelompok atau individu tertentu dalam hal akses, pendapatan, kekayaan, kesempatan, atau hasil ekonomi.

Ketimpangan ekonomi merujuk pada kesenjangan yang signifikan antara kelompok

pendapatan tinggi dan rendah dalam sebuah masyarakat atau negara. Faktor penyebab ketimpangan ekonomi sangat beragam dan meliputi perbedaan pendapatan, akses terhadap pendidikan dan pelatihan, kesenjangan akses terhadap sumber daya, serta ketidakmerataan struktur ekonomi menurut (Ningrum dkk., 2024). Ketimpangan ekonomi merupakan isu krusial yang terus menjadi tantangan utama di banyak negara berkembang. Ketimpangan ini tercermin dari distribusi pendapatan yang tidak merata, kesenjangan dalam akses pendidikan dan kesehatan, serta perbedaan signifikan dalam kesempatan ekonomi (Aminda & Aminda, 2024).

Kesenjangan ekonomi dapat menimbulkan dampak negatif jangka panjang terhadap stabilitas sosial dan politik. Sumber daya ekonomi yang tidak seimbang didistribusikan di masyarakat ini terjadi karena perbedaan besar dalam kemampuan finansial antara kelompok pendapatan tinggi dan rendah (Sugiastuti & Pratama, 2022). Distribusi kekayaan dan kesempatan yang tidak merata dapat menimbulkan ketidakpuasan sosial, yang dapat menimbulkan konflik dan protes sosial. Kesenjangan ini juga mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, karena kelompok marginal cenderung mempunyai suara yang lebih lemah. Oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, namun juga menerapkan kebijakan yang menjamin kesetaraan kesempatan dan akses terhadap sumber daya, sehingga membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif, (Salsabil & Rianti, 2023).

Indikator Ketimpangan Ekonomi

Terdapat berbagai indikator yang berkontribusi terhadap terjadinya ketimpangan ekonomi di masyarakat, yang mencakup berbagai aspek, menurut (Yuliani dkk., 2025) yaitu:

- a. **Kondisi Demografi**
Kondisi demografi sangat berpengaruh terhadap kependudukan di suatu daerah, yang mencakup berbagai aspek mulai dari jumlah penduduk, komposisi, hingga persebaran penduduk itu sendiri. Jumlah penduduk yang lebih besar dapat memungkinkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat menimbulkan masalah jika tidak diimbangi dengan penyediaan infrastruktur dan layanan dasar yang memadai.
- b. **Kondisi Pendidikan**
Pendidikan yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara signifikan, memberi mereka kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan untuk bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif.
- c. **Kesenjangan Pendapatan**
Ketika pendapatan tidak merata dalam masyarakat, dapat terjadi kesenjangan ekonomi yang signifikan, yang berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan hidup setiap orang). Dalam hal ini, orang dari kelompok berpendapatan rendah sering kali menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan.
- d. **Pembangunan yang Tidak Merata**
Kesenjangan ekonomi sering kali disebabkan oleh pembangunan negara atau daerah yang tidak merata. Ketika infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya tidak dikembangkan secara merata secara regional, daerah tertentu dapat mengalami stagnasi ekonomi, sementara daerah lain dapat mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat.
- e. **Kurangnya Lapangan Pekerjaan**
Kurangnya lapangan pekerjaan adalah masalah besar yang dapat menyebabkan tingkat pengangguran yang tinggi, yang memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Jika ada sedikit peluang kerja, orang dan keluarga akan sulit memenuhi

kebutuhan dasar mereka seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan.

Kesenjangan ekonomi tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga memiliki implikasi luas bagi stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, pendekatan terpadu yang melibatkan semua sektor termasuk pendidikan, lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur diperlukan untuk menciptakan kesetaraan dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat, (Aziz dkk., 2025).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati, (Abdussamad & Sik, 2021). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki kejadian, fenomena kehidupan individu-individu dan menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Variabel yang ditentukan peneliti dalam penelitian ini adalah Analisis Program Bantuan Sosial Dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi Di Desa Tetelesi Afia Mazingo. Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Mazingo Tetelesi Afia.

Sumber data dari penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu data yang langsung dari lapangan atau tempat penelitian. data dalam penelitian yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 15 orang yang terdiri dari 2 orang dari Pemerintahan Desa, dan 13 orang dari masyarakat penerima bantuan sosial. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber bacaan yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung data primer yang telah diperoleh. Maka data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal dan sebagainya yang mendukung permasalahan penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti menetapkan populasi penelitian adalah masyarakat penerima bantuan sosial.

**Tabel 2. Populasi Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Pemerintah
Di Desa Tetelesi Afia Mazingo**

No	kategori	Jumlah
1	Jumlah penduduk	1877
2	Penerima (BLT)	8 keluarga
3	Penerima (PKH)	34 keluarga
5	Penerima (BPNT)	36 keluarga
6	Rumah layak huni	2 keluarga

Sumber : data desa tetelesi afia, mazingo tahun 2025

Sementara sampel dalam penelitian ini berjumlah 13 orang penerima program bantuan dan 2 orang pemerintahan desa sebagai pelaksana program. Instrumen penelitian adalah alat - alat yang diperlukan atau yang digunakan untuk mengumpulkan informasi data penelitian, (Nurfaidah dkk., 2025). Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang mengumpulkan informasi dengan cara datang ke lapangan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan dengan pengumpulan data yang dilakukan, maka instrumen yang digunakan adalah alat tulis panduan wawancara yang dinyatakan secara lisan kepada informan, beserta alat dokumentasi seperti Camera. Dalam proses pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dirancang dan disusun oleh peneliti sendiri agar tersusun secara baik dan sistematis agar penelitian menghasilkan data yang valid. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi.

Observasi merupakan proses pengumpulan data dengan melihat secara langsung keadaan di

lapangan. Data yang diobservasi dapat berupa sikap, perilaku, tindakan serta interaksi. Observasi dalam penelitian ini adalah observasi terhadap Orang tua dan Anak di Desa Mazingo. Observasi yang dilakukan peneliti adalah pengamatan secara langsung dengan melihat serta mengamati proses wawancara yang berlangsung pada saat peneliti melaksanakan wawancara kepada informan. Metode ini digunakan peneliti guna memperoleh data dan mengetahui lebih dalam tentang Program Bantuan Sosial Pemerintah Dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi Di Desa Tetehosi Afia Mazingo. Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara dengan penerima dan pengurus pemerintahan di Desa Tetehosi Afia Mazingo. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana program Bantuan Sosial Pemerintah Dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi Di Desa tersebut. Saat wawancara peneliti bebas menanyakan apa saja pertanyaan kepada narasumber yang berhubungan dengan penelitian. Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik dokumentasi dilakukan dalam bentuk memotret semua kejadian yang berlangsung selama peneliti melakukan penelitian di Desa Mazingo.

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data dalam penelitian terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Tetehosi Afia Mazingo merupakan desa yang terletak di wilayah kecamatan gunungsitoli utara, Provinsi Sumatera Utara. Mayoritas penduduk di desa ini bekerja di sektor pertanian, perkebunan kecil, dan nelayan, kuli bangunan dan lainnya. yang dimana tingkat pendapatan rendah desa ini masih tergolong rendah dengan rata-rata pendapatan keluarga di bawah standar upah minimum regional. Ketimpangan ekonomi cukup terlihat dari perbedaan penguasaan aset, kepemilikan tanah, dan akses terhadap pendidikan maupun layanan kesehatan. Pemerintah, melalui berbagai program bantuan sosial, berupaya mengurangi ketimpangan ini, di antaranya dengan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan bantuan subsidi lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di lapangan, terkait bagaimana pelaksanaan program bantuan sosial dalam mengurangi ketimpangan ekonomi di Desa Tetehosi Afia Mazingo, dari kedua sumber pemerintah desa mengungkapkan bahwa data penerima bantuan sosial yang digunakan dalam penyaluran program, terutama yang bersumber dari pemerintah pusat, tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi aktual Masyarakat yang terbaru. Ada penerima bantuan yang sebenarnya sudah tidak layak karena peningkatan kondisi ekonomi tapi akan melakukan peralihan pada waktu pendataan ulang dan diberikan pada yang lebih membutuhkan. namun meskipun data penerima bantuan tidak sepenuhnya sesuai dengan data kondisi Masyarakat terbaru, sebagai pengurus desa/pemerintahan desa melakukan pendataan ulang supaya penerima bantuan tepat sasaran.

Menilai sejauh mana informasi mengenai program bantuan sosial disampaikan dan dipahami oleh masyarakat. Sosialisasi yang efektif memastikan bahwa penerima potensial mengetahui adanya program tersebut dan memahami cara mengaksesnya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sosialisasi program bantuan sosial di tingkat desa tetehosi afia mazingo

telah dilakukan secara aktif dan berlapis, baik melalui forum formal maupun pendekatan sosial kultural. Meski masih dihadapkan pada sejumlah keterbatasan, pemerintah desa telah menunjukkan upaya untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat agar setiap warga memahami hak, kewajiban, dan alasan di balik distribusi bantuan. Dengan demikian, sosialisasi menjadi elemen strategis dalam memastikan program bantuan berjalan adil, transparan, dan berdaya guna bagi masyarakat miskin.

Mengukur sejauh mana tujuan yang ditetapkan dalam program bantuan sosial tercapai. Ini mencakup evaluasi apakah program berhasil meningkatkan kesejahteraan penerima dan mengurangi beban ekonomi mereka. Dari hasil wawancara yang didapat bahwa program bantuan sosial telah berkontribusi nyata dalam mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin di desa, walaupun belum sepenuhnya mampu meningkatkan kemandirian ekonomi tapi setidaknya dapat menutupi kebutuhan lainnya sedikit demi sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan program telah tercapai secara parsial, dan membutuhkan integrasi dengan program pemberdayaan lainnya agar lebih berkelanjutan.

Terkait dengan dampak dari program bantuan pemerintah, hasil wawancara dengan masyarakat desa, diketahui bahwa program bantuan sosial pemerintah memberikan dampak nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya para petani, buruh, dan pekerja informal. Sebagian besar narasumber menyatakan bahwa bantuan seperti BPNT, PKH, BLT, Beasiswa/KIS, BPJS, dan Bantuan Perumahan sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Sebelum bantuan, banyak keluarga mengalami keterbatasan ekonomi yang sangat berkekurangan yang hanya makan sekali sehari, kesulitan membeli perlengkapan sekolah, atau hidup di rumah tidak layak huni. Setelah menerima bantuan, kehidupan mereka menjadi lebih stabil dan layak, anak-anak bisa kembali sekolah dengan perlengkapan memadai, dan keluarga bisa berobat tanpa terbebani biaya. Beberapa warga bahkan mulai berinisiatif mandiri dengan membuka usaha kecil seperti berjualan hasil panen, gorengan, atau kue, berkat sedikit kelonggaran ekonomi dari bantuan yang diterima. Dari sisi sosial, bantuan juga mempererat hubungan antar masyarakat karena merasa sama-sama terbantu, sehingga mengurangi kecemburuan dan jarak sosial. Walaupun belum sepenuhnya mengeluarkan warga dari kemiskinan, program ini telah mengurangi beban hidup dan memperkecil ketimpangan ekonomi. Mereka yang sebelumnya sangat tertinggal kini mulai sejajar dengan warga lain dalam memenuhi kebutuhan dasar dan hak sosial seperti pendidikan dan Kesehatan.

Dari ketimpangan ekonomi, hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat Desa Totohosi Afia Mazingo, mengungkapkan bahwa bantuan sosial tetap disalurkan kepada masyarakat namun dengan frekuensi yang berbeda-beda. Berikut tabel penerimaannya :

Tabel 3. Penerimaan Jenis Bantuan Yang Diterima Masyarakat

Jenis Bantuan	Perkiraan Jumlah	Frekuensi per Tahun	Total Estimasi per Tahun
BPNT	Rp 200.000/bulan	12 kali	Rp 2.400.000
PKH (<i>anak SD/SMP</i>)	Rp 900.000 – Rp 1.500.000	4 kali	Rp 900.000 – 1.500.000
BPJS Kesehatan (PBI)	± Rp 504.000/orang/tahun (non-tunai)	12 bulan	Nilai manfaat non-tunai
BLT Dana Desa (<i>jika diterima</i>)	Rp 300.000/bulan	12 kali	Rp 3.600.000

Sumber : Data Hasil Wawancara, 2025

Jumlah jenis bantuan yang diterima terdiri dari 3 jenis utama, atau 4 jika BLT juga diterima.

Sementara frekuensi penerimaannya diantaranya : BPNT: 12x/tahun (bulanan), PKH: 4x/tahun (triwulan), BPJS: akses kesehatan sepanjang tahun, BLT (jika ada): 12x/tahun (bulanan). Sehingga total estimasi nilai manfaat/tahun:

- Tanpa BLT: Rp 3.804.000 – Rp 4.404.000 + layanan BPJS
- Dengan BLT: Rp 7.404.000 – Rp 8.004.000 + layanan BPJS

Berdasarkan analisis terhadap data bantuan sosial yang diterima oleh 13 orang masyarakat, berikut hasil pengurangannya terhadap ketimpangan ekonomi:

- Rata-rata Total Bantuan Sosial per Orang per Tahun:
 - Minimal: Rp 7.188.308
 - Maksimal: Rp 7.815.231
- Persentase Pengurangan Ketimpangan Ekonomi (Estimasi):
 - Dengan bantuan minimum: $\pm 59,9\%$
 - Dengan bantuan maksimum: $\pm 65,1\%$

➤ Interpretasi:

Artinya, jika diasumsikan penghasilan tahunan masyarakat sebelum bantuan hanya sekitar Rp 12.000.000 (atau Rp 1 juta/bulan), maka bantuan sosial yang diberikan telah:

- Meningkatkan daya beli dan kesejahteraan rata-rata warga sebesar 60–65%.
- Memberi dampak signifikan terhadap pengurangan ketimpangan dan peningkatan keadilan sosial, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, perbandingan dengan teori dikemukakan oleh (Hariyanto & Junaidi, 2023) menyatakan bahwa dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan dan peningkatan akses masyarakat terhadap pangan, Pemerintah telah meluncurkan program berbagai bantuan sosial untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, seperti program bantuan harapan (PKH), bantuan sosial tunai (BST), dan program pemerdayaan kesejahteraan keluarga (PPKK). Pemerintah menggunakan berbagai program atau stimulus. Salah satunya adalah Program Bantuan Sosial. Dengan program bantuan sosial ini dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu masyarakat menghadapi dampak krisis, memperbaiki perekonomian penduduk penerima bantuan, membantu melindungi kelompok yang lebih beresiko seperti lansia, penyandang disabilitas dan keluarga miskin.

Sementara menurut (Saragih, 2024) untuk mendapatkan seberapa efektif pelaksanaan program bantuan sosial diukur menggunakan empat indikator yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi proyek, tujuan proyek, dan pemantauan proyek. Menurut (Peramita dkk., 2025) dampak adalah akibat yang ditimbulkan dari suatu kegiatan baik direncanakan maupun tidak direncanakan. Dampak merupakan suatu yang harus terjadi yang dapat menyebabkan adanya perubahan yang diinginkan. Dampak positif adalah pengaruh dari suatu kegiatan yang dijalankan sehingga menimbulkan unsur kebaikan terhadap Masyarakat. Menurut (Gunung dkk., 2023) ketimpangan ekonomi merujuk pada kesenjangan yang signifikan antara kelompok pendapatan tinggi dan rendah dalam sebuah masyarakat atau negara. Faktor penyebab ketimpangan ekonomi sangat beragam dan meliputi perbedaan pendapatan, akses terhadap pendidikan dan pelatihan, kesenjangan akses terhadap sumber daya, serta ketidakmerataan struktur ekonomi.

Dari hasil wawancara di Desa Tetehehosi Afia Mazingo, diketahui bahwa pemerintah desa sudah berusaha memastikan bantuan tepat sasaran dengan pendataan langsung. Namun, masih ada kendala karena data dari pusat terkadang tidak sesuai, seperti ada penerima yang sudah pindah atau sudah mampu. Untuk mengatasi ini, pemerintah desa melakukan pendataan ulang dan mengalihkan bantuan kepada yang lebih membutuhkan. Hal ini sudah sesuai dengan teori

tentang pentingnya ketepatan sasaran, meskipun masih ada tantangan.

Berdasarkan hasil wawancara, berikut adalah poin-poin dampak program bantuan sosial di Desa Tetehehosi Afia Mazingo, baik positif maupun negatif, serta perbandingannya dengan teori.

Tabel 4. Dampak Positif Program Bantuan Sosial

No	Aspek Dampak Bantuan Sosial	Temuan Wawancara	Dukungan Teori
1	Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Masyarakat bisa makan cukup dan teratur; tidak hanya mengandalkan sayur kebun.	(Masrohatin dkk., 2025) : Bansos membantu memenuhi kebutuhan dasar dan melindungi kelompok rentan.
2	Akses Pendidikan Lebih Baik	Anak-anak kembali sekolah, punya seragam, sepatu, alat tulis; terbantu beasiswa.	(Masrohatin dkk., 2025) : Bansos meningkatkan kesejahteraan dan akses pendidikan.
3	Perbaikan Kesehatan	Masyarakat bisa berobat ke puskesmas/RS karena punya BPJS.	(Masrohatin dkk., 2025) : Bansos membantu kelompok rentan termasuk dalam akses kesehatan.
4	Perbaikan Hunian	Rumah yang tadinya tidak layak kini diperbaiki lewat rehabilitasi sosial.	(Salsabila dkk., 2024) : Bansos memperbaiki kesejahteraan termasuk sarana tempat tinggal.
5	Peluang Usaha dan Kemandirian	Warga mulai berjualan, ternak ayam kecil-kecilan dari hasil bansos.	(Salsabila dkk., 2024): Bansos mendorong ekonomi dan kemandirian sebagai tujuan jangka panjang.
6	Penguatan Sosial dan Solidaritas	Lingkungan jadi lebih peduli; gotong royong meningkat.	(Hababil dkk., 2024) : Ketimpangan sosial berdampak pada relasi sosial; program sosial memperkecil jarak sosial.
7	Pengurangan Ketimpangan Ekonomi	Warga merasa lebih sejajar dengan tetangga; tidak tertinggal lagi.	(Hababil dkk., 2024): Ketimpangan ditekan lewat akses merata terhadap sumber daya dan bantuan.

Sumbr : Data Olahan Peneliti, 2025

Tabel 5. Dampak Negatif atau Keterbatasan Program

No	Permasalahan	Temuan Wawancara	Dukungan Teori
1	Bantuan Tidak Meningkatkan Kemandirian Sepenuhnya	Bantuan masih bersifat konsumtif; belum cukup untuk memulai usaha besar.	(Saniah & Afrizal, 2024) : Tidak menyebutkan efek negatif secara eksplisit, tetapi mengisyaratkan perlunya pemantauan dan pemberdayaan lanjutan.
2	Ketidaktepatan Sasaran	Ada penerima yang sudah pindah atau sudah mampu, tapi masih terdaftar.	(Saniah & Afrizal, 2024) : Ketepatan sasaran adalah indikator penting dalam pelaksanaan bansos.
3	Ketergantungan pada Bantuan	Beberapa warga belum menunjukkan upaya mandiri; masih mengandalkan bantuan.	(Salsabila dkk., 2024) : Bansos harus bersifat sementara dan mendorong kemandirian, bukan ketergantungan.
4	Distribusi dan Data Pusat yang Tidak Selalu Akurat	Data pusat tidak sesuai dengan kondisi terkini di	(Saragih, 2024) : Update data dan pemantauan penting untuk efektivitas

No	Permasalahan	Temuan Wawancara	Dukungan Teori
		desa.	program.

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2025

Program bantuan sosial di Desa Tetehehosi Afia Mazingo secara umum sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh para ahli. Dampak positifnya terlihat jelas dari peningkatan kualitas hidup warga, mulai dari pangan, pendidikan, kesehatan, hingga perumahan. Namun, ada tantangan dalam hal kemandirian ekonomi dan ketepatan sasaran, yang menunjukkan perlunya perbaikan data, pembinaan usaha kecil, dan monitoring berkelanjutan agar bantuan tidak hanya mengurangi beban sementara, tapi juga mengangkat derajat ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan, diantaranya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Nurwahyuliningsih & Arsyad, 2025) dengan judul “Analisis Dampak Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Gorontalo”. Hasil penelitian menemukan bahwa penerima BPNTD menunjukkan peningkatan kesejahteraan relatif signifikan, termasuk meningkatnya konsumsi pangan serta efisiensi belanja rumah tangga, walaupun pengaruhnya terhadap penurunan ketimpangan ekonomi secara luas masih terbatas jika tidak disertai program sosial lainnya.

Penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh (Firdaus, 2022) berjudul “Transparansi Program Bantuan Langsung Tunai pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Waetuo, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme penyaluran BLT sudah cukup sistematis, terdapat kelemahan dalam komunikasi dan pengawasan internal yang menyebabkan beberapa penerima menggugat ketepatan sasaran, namun secara umum BLT memberikan efek jangka pendek pada perbaikan ekonomi rumah tangga penerima.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Hermawati & Winarno, 2020) dengan judul “Persepsi Keluarga Penerima Manfaat tentang Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia”. Hasil penelitian mengungkap bahwa meskipun sebagian penerima mengakui adanya peningkatan dalam taraf hidup jangka pendek, banyak yang menyampaikan kekhawatiran mengenai keberlanjutan bantuan, administrasi yang kurang jelas, dan distribusi yang kadang tidak merata yang pada akhirnya mengurangi dampak program dalam menurunkan ketimpangan jangka panjang.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu dalam hal fokus pada program bantuan sosial pemerintah dan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat. Sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif, baik kualitatif maupun kuantitatif, serta memanfaatkan data primer dan sekunder. Namun, penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena secara khusus menyoroti ketimpangan ekonomi antar kelompok profesi di tingkat desa, bukan hanya dampak terhadap kemiskinan secara umum. Selain itu, penelitian ini bersifat lebih mikro dengan konteks lokal yang spesifik, yaitu Desa Tetehehosi Afia, Mazingo, sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih detail tentang dampak nyata bantuan sosial dalam menekan ketimpangan ekonomi pada tataran masyarakat desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak program bantuan sosial terhadap pengurangan ketimpangan ekonomi masyarakat di Desa Tetehehosi, Afia Mazingo, dapat disimpulkan bahwa program bantuan sosial memberikan dampak yang cukup signifikan dalam

membantu masyarakat miskin dan rentan. Program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), beasiswa pendidikan, serta bantuan perbaikan rumah berhasil memberikan manfaat nyata dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Bantuan tersebut tidak hanya meringankan beban ekonomi keluarga penerima, tetapi juga meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak. Secara sosial, program ini juga memperkuat hubungan antarwarga, menciptakan solidaritas, dan mendorong partisipasi dalam kegiatan masyarakat. Meskipun dampak terhadap peningkatan kemandirian ekonomi belum terlalu signifikan, bantuan sosial telah memberikan pondasi awal menuju perbaikan taraf hidup dan pengurangan ketimpangan ekonomi antarwarga desa. Namun, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan program, seperti ketidaktepatan data penerima dan kecenderungan masyarakat untuk bergantung pada bantuan. Oleh karena itu, keberlanjutan program perlu disertai dengan upaya pemberdayaan masyarakat agar mampu mandiri secara ekonomi.

Saran dari penelitian ini, diharapkan agar pelaksanaan program bantuan sosial lebih tepat sasaran melalui pendataan yang akurat dan transparan, serta mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi penerima secara menyeluruh. Selain itu, adanya pengawasan dan evaluasi berkala sangat penting untuk memastikan bantuan digunakan sesuai tujuan. Selain itu, diharapkan agar masyarakat penerima bantuan sosial tidak hanya bergantung pada bantuan yang diberikan, tetapi dapat memanfaatkannya sebagai modal awal untuk meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga, seperti melalui usaha kecil atau kegiatan produktif lainnya. Bagi pemerintahan daerah dan lembaga terkait disarankan agar ke depannya program bantuan sosial dilengkapi dengan pelatihan keterampilan atau pemberdayaan ekonomi, sehingga dapat mendorong terciptanya masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Aminda, A., & Aminda, R. S. (2024). PENGARUH ADANYA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TERHADAP KESENJANGAN EKONOMI DI INDONESIA. *Jurnal Pengabdian Masyarakat UIKA Jaya SINKRON*, 2(3), 237–255.
- Aziz, A., Akbar, A. Y., Daulay, J., & Ahmad, A. P. (2025). Dampak Kebijakan Pembangunan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kota. *CEMERLANG: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 5(1), 261–275.
- Firdaus, R. (2022). Transparansi Program Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Waetuo, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara. *Journal I La Galigo*, 5(1), 44–52.
- Gunung, E. B., Setiawan, D., & Yasin, M. (2023). Menganalisis Penyebab, Konsekuensi dan Solusi Potret Ketimpangan Ekonomi. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen*, 2(2), 329–339.
- Hababil, M. P., Firdaus, M. K., Nazhmi, N., Hamdani, M. D., Alghifary, M. R., & Fadilla, A. (2024). Analisis pengaruh pemerataan ekonomi dalam upaya menghapus ketimpangan sosial-ekonomi antar masyarakat. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1–9.
- Hariyanto, E., & Junaidi, M. A. (2023). Sinergi pengelolaan zakat dan program bantuan sosial pemerintah untuk mereduksi kemiskinan. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 16(2), 13–31.
- Hermawati, I., & Winarno, E. (2020). Persepsi Keluarga Penerima Manfaat Tentang Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 9(3), 257–270.

-
- Khoironi, M. F., & Sudrajat, A. (2023). Budaya Stratifikasi Sosial terhadap Kesenjangan Ekonomi Keluarga dan Kualitas Pendidikan pada Anak. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 9(1), 25–34.
- Masrohatin, S., Maulidi, A. W., & Rizal, M. (2025). EFEKTIVITAS ADANYA BANTUAN SOSIAL UNTUK MEMINIMALISIR KEMISKINAN PADA MASYARAKAT JEMBER. *PEDAMAS (PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)*, 3(02), 621–629.
- Ningrum, E. P., Sumarno, M., Nursyamsi, S. E., & Siregar, N. (2024). Faktor Terkait Kesenjangan Ekonomi dan Kesejahteraan. *PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), 116–126.
- Nurfaidah, S. K. M., Kasita, S. D., SE, S. A., SE, S., SE, M., Ali, S. E., Ramli, S., SE, S. P., & MM, D. M. A. (2025). *Instrumen Penelitian Kualitatif*. PENERBIT KBM INDONESIA.
- Nurwahyuliningsih, E., & Arsyad, Y. (2025). Analisis Dampak Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (Bpntd) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Studi Ilmu Politik*, 4(1), 12–22.
- Peramita, R., Amelia, N., Sriati, S., & Martha, A. (2025). Pengertian, Tujuan, dan Dampak Pendidikan Global. *Education Achievement: Journal of Science and Research*, 92–98.
- Salsabil, I., & Rianti, W. (2023). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, kesehatan dan pertumbuhan penduduk terhadap tingkat kemiskinan. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 15–24.
- Salsabila, N., Muna, N., Pradana, V. H., & Nurcahya, W. F. (2024). Analisis efektivitas bantuan sosial (bansos) dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1–13.
- Saniah, S., & Afrizal, S. (2024). Transformasi Sosial Penerima Bantuan Sosial Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Desa Cipayung. *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 7(1), 829–836.
- Saragih, J. (2024). Evaluasi Efektivitas Kebijakan Bantuan Sosial Pemerintah dalam Mengatasi Kemiskinan. *Cakrawala Repositori IMWI*, 7(3), 1175–1185.
- Sugiasuti, R. H., & Pratama, M. R. (2022). Dampak Buruk Pembangunan Tanpa Pemerataan: Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah Di Indonesia. *Profit: Jurnal Adminitrasi Bisnis*, 16(1), 79–90.
- Supit, B. F., & Lumingkewas, E. (2023). Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Di Kelurahan Talikuran Utara Kecamatan Kawangkoan Utara Minahasa. *Academy of Education Journal*, 14(2), 1059–1068.
- Yuliani, N. M., Paturochman, I. R., Mubarak, A. T., & Muzaki, R. A. (2025). Kebijakan fiskal dalam mengatasi ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 18(1), 296–300.
- Yuliantaka, R. K. (2025). Peran Pemerintah dalam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi: Kajian Pustaka Kebijakan Fiskal Redistributif. *LIKUID: Jurnal Ekonomi*, 1(01), 5–8